



FokBis

Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi

<https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>
ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209

Apakah Bantuan Sosial dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

Rina Nabilah¹, Dani Sugiri²
Politeknik Keuangan Negara STAN^{1,2}
email: rimanabilah10@gmail.com¹

Article Information

History of Article:

Received September 4th 2021

Accepted June 13th 2022

Published July 8th 2022

DOI:

10.32639/fokbis.v21i1.115



ABSTRAK

Provinsi Sumatera Selatan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja bantuan sosial dan modal di APBD. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh parsial dan simultan Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Belanja Modal (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) pada daerah otonom berupa kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel periode 2010—2020. Dalam penelitian ini, penulis memilih data sekunder bertipe panel sebanyak 110 sampel secara *purposive sampling* yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari laman DJPK dan BPS. Data dianalisis secara urut menggunakan pengujian estimasi model regresi data panel, asumsi klasik, dan hipotesis melalui *Eviews 11 Student Version*. Hasil penelitian menunjukkan REM sebagai model terbaik. Secara parsial, belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan belanja modal memberi pengaruh negatif dan bersifat signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, kedua jenis belanja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial; Belanja Modal; Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

South Sumatra Province seeks to realize community welfare through social assistance and capital expenditures in the APBD. This study was conducted with the aim of knowing the partial and simultaneous effect of Social Assistance Expenditure (X_1) and Capital Expenditure (X_2) on the Poverty Level (Y) in autonomous regions in the form of regencies and cities in South Sumatra Province for the period 2010-2020. In this study, the authors chose panel-type secondary data as many as 110 samples by purposive sampling collected through the documentation method from the DJPK and BPS pages. The data were analyzed sequentially using the estimation test of panel data regression models, classical assumptions, and hypotheses through the *Eviews 11 Student Version*. The results showed REM as the best model. Partially, social assistance spending has no effect on the poverty level, while capital expenditure has a negative and significant impact on the poverty level. Simultaneously, both types of spending have a significant effect on the poverty level.

Keywords: Social Assistance Expenditure; Capital Expenditure; Poverty Rate

PENDAHULUAN

Kemiskinan, kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar minimum kehidupan, perlu dilihat sebagai masalah yang serius (Putra, 2018). Nurwati (2008) menambahkan bahwa kemiskinan akan terus ada dalam masyarakat. Dalam lingkup pemerintah daerah, kemiskinan tentu dipandang sebagai masalah kesejahteraan sosial yang memengaruhi kualitas pembangunan daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh Todaro (2003) yang menyatakan bahwa penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu ukuran menilai kesuksesan pembangunan.

Pentingnya penurunan tingkat kemiskinan daerah mendorong pemerintah daerah terus berupaya penuh meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Hal ini dimuat dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan nasional bernegara. Menurut Lengogeni (2010), pembangunan daerah otonom merupakan suatu upaya untuk meningkatkan potensi pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan kemampuan secara profesional dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pembangunan daerah diwujudkan pemerintah melalui otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Peran nyata otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan daerah yang bersifat tahunan. Otonomi daerah berupa pemberian wewenang serta tanggung jawab yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dapat mengelola sumber keuangan yang ada untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di daerahnya melalui distribusi kewenangan, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber keuangan untuk penyediaan layanan publik (Halim, 2002). APBD memiliki peran sebagai media pengalokasian sumber daya, media untuk menilai prestasi, dan media pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tuasikal, 2008). APBD juga memiliki fungsi otorisasi sehingga menjadikan anggaran daerah sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun dimaksud (RI, 2003).

Melalui APBD, pemerintah daerah melaksanakan pengeluaran daerah sebagai salah satu ruang lingkup keuangan daerah. Belanja daerah memiliki urgensi sebagai alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif (Natalia et al., 2019). Pembelanjaan daerah harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam hal pengelolaan keuangan dan penganggaran daerah (Suhadak, 2007). Hal ini berarti pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerah dalam kegiatan pembelanjaan daerah secara hati-hati sehingga penurunan tingkat kemiskinan dapat diwujudkan.

Dua jenis belanja pemerintah daerah dibahas dalam penelitian ini, yakni belanja bantuan sosial dan modal. Belanja bantuan sosial dipilih karena perannya sebagai belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius (Mufliha, 2018). Sendouw et al. (2017) mengemukakan jika belanja bantuan sosial pemerintah memang memiliki misi khusus untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, baik ketika bantuan sosial diberikan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Di sisi lain, Belanja modal mampu memudahkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat melalui pembangunan daerah (Kaligis et al., 2017). Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran atau belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk pembiayaan pembangunan daerah seperti pengadaan aset, infrastruktur, prasarana, dan sarana dasar (Sendouw et al., 2017). Meski kedua jenis belanja tersebut berperan penting dalam menyejahterakan masyarakat, perbedaan hasil penelitian terdahulu oleh Wati (2015); Sendouw et al., Kaligis et al., dan Satari (2017); Rarun et al., Isa, Mufliha, dan (2018); Anderesta, (2019); serta Mukarramah (2020) terkait pengaruh jenis belanja tersebut terhadap tingkat kemiskinan masih ditemukan.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menduduki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS ^(n.d.-f), rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional pada 2020 berada di angka 9,78% (semester pertama) dan 10,19% (semester kedua). Tingkat kemiskinan Sumsel pada 2020 berada di angka 12,66% di semester pertama dan 12,98% di semester kedua. Dari kesepuluh objek penelitian, rata-rata tingkat kemiskinan Kota Pagar Alam dalam posisi terendah yaitu 9,13%, sedangkan rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin dalam posisi tertinggi yaitu 17,65%.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja pemerintah daerah, yakni belanja bantuan sosial serta belanja modal, terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat pada Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera selatan dipilih karena provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang menempati posisi pertengahan dalam tingkat kemiskinan secara nasional. Objek penelitian meliputi sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan data sekunder bertipe data panel yang diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, n.d.) dan Badan Pusat Statistik (BPS, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c, n.d.-d, n.d.-e.).

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan belanja bantuan sosial dan modal terhadap tingkat kemiskinan objek penelitian. Belanja Bantuan Sosial (X_1), Belanja Modal (X_2), dan Tingkat Kemiskinan (Y) dipilih sebagai variabel penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun praktis bagi para pembaca. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan riset atas dampak belanja pemerintah dan penanganan tingkat kemiskinan. Secara praktik, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penyusun anggaran, penentu kebijakan pengalokasian anggaran dan pembangunan daerah.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi dalam pengelolaan keuangan di Indonesia, termasuk pengelolaan keuangan daerah diawali dengan diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Reformasi tersebut, juga berdampak pada perubahan regulasi dan tata kelola keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terkait keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). APBD suatu daerah merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya (RI, 2003).

Pemberlakuan otonomi daerah adalah wujud nyata pemerintah daerah dalam menjalankan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2002), daerah diberikan sejumlah wewenang beserta tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan keuangan demi kemakmuran rakyat di daerah pemerintahannya. Otonomi tersebut dilakukan dengan melakukan distribusi kewenangan, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber-sumber keuangan dalam rangka pembiayaan penyediaan sejumlah layanan publik (Halim, 2002). Problematika pengelolaan keuangan daerah, termasuk penganggaran daerah merupakan aspek yang memerlukan pengaturan secara *prudent* oleh pemerintah daerah (Suhadak, 2007).

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah salah satu jenis belanja daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2020). Menurut Sendouw et al. (2017), belanja bantuan sosial mempunyai kekhususan untuk menambah kesejahteraan masyarakat, baik ketika bantuan sosial tersebut diberikan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah, pengelompokan belanja bantuan sosial sebagai bagian dari belanja daerah mengalami perubahan. Sebelum APBD Tahun 2021, pemerintah daerah mengelompokkan belanja bantuan sosial sebagai bagian dari jenis belanja tidak langsung, seperti diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Setelah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ditetapkan, pemerintah daerah mengelompokkan belanja bantuan sosial menjadi salah satu bagian dari jenis belanja operasi.

Belanja Modal

Belanja modal adalah salah satu jenis belanja daerah yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2020). Menurut Sendouw et al. (2017), belanja modal merupakan belanja pemerintah untuk pengadaan prasarana dan sarana dasar di daerah, seperti untuk pembangunan/pengadaan aset daerah, serta infrastruktur. Sebelum Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dicabut, pemerintah daerah mengelompokkan belanja modal sebagai bagian dari jenis belanja langsung. Saat ini, pemerintah daerah mengelompokkan belanja modal menjadi jenis tersendiri, yakni belanja modal.

Pengurangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan masalah kesejahteraan sosial yang memengaruhi kualitas pembangunan daerah. Menurut Todaro (2003), penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Pentingnya pengurangan tingkat kemiskinan didukung oleh Nurwati (2008) yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai masalah sosial yang terus ada dalam kehidupan masyarakat. Putra (2018) menambahkan, kemiskinan juga perlu dilihat sebagai masalah yang serius. Secara definitif, kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk dapat mencukupi standar hidup yang minimum dengan pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada besaran konsumsi (Kuncoro, 2003). Badan Pusat Statistik (2020) menegaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi, sisi materi, dan sisi fisik, yang diukur dengan besaran pengeluaran, untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan.

Upaya pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat pemerintah daerah lakukan adalah melakukan belanja daerah berdasarkan *value for money* yang meliputi ekonomis, efisien, dan efektif. Pengeluaran pemerintah dapat berperan sebagai alat campur tangan pemerintah yang terefektif terhadap perekonomian (Natalia et al., 2019). Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melihat sejauh mana belanja pemerintah daerah dapat memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan pada perbaikan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu (Sendouw et al., 2017). Dalam melakukan belanja daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerahnya sehingga mampu melihat pengaruh belanja daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan riset ini antara lain penelitian Wati (2015), Sendouw et al. (2017), Kaligis et al. (2017), Satari (2017), Mufliha (2018), Rarun et. al (2018), Isa (2018), Anderesta

(2019), dan Mukarramah (2020). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan teori terkait ketiga variabel yang telah dipilihdapat dijelaskan berikut.

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1)

Penelitian Sendouw et al. (2017) di Kota Manado menunjukkan hasil bahwa belanja sosial ternyata tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, penelitian Satari (2017) di Provinsi Jawa Tengah, Mufliha (2018) di Indonesia, Rarun et al. (2018) di Provinsi Sulawesi Utara, serta Anderesta (2019) di Indonesia, memberikan hasil bahwa belanja bantuan sosial memberi pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Mufliha (2018) dan Satari (2017) menyimpulkan bahwa belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Rarun et al. (2018) dan Anderesta (2019) menyimpulkan bahwa belanja bantuan sosial secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, belanja bantuan sosial dapat disimpulkan sebagai belanja yang diharapkan berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.

2. Realisasi Belanja Modal (X_2)

Penelitian Kaligis et al. (2017) menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah memberi pengaruh positif secara tidak langsung terhadap penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* di Minahasa Utara. Berbeda halnya dengan penelitian Wati (2015) di 33 Provinsi di Indonesia, Sendouw et al. (2017) di Kota Manado, Isa (2018) di Provinsi Gorontalo, serta Mukarramah (2020) di Provinsi Aceh, yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, belanja modal dapat disimpulkan sebagai belanja yang diharapkan berpengaruh negatif secara parsial terhadap tingkat kemiskinan.

3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Modal (X_2)

Penelitian Sendouw et al. (2017) menunjukkan hasil bahwa belanja modal daerah, belanja sosial daerah, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Oleh karena itu, belanja bantuan sosial dan modal dapat disimpulkan sebagai belanja yang diharapkan berpengaruh negatif secara simultan terhadap tingkat kemiskinan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis berisi dugaan yang memiliki kemungkinan benar atau juga salah (Sutrisno, 1983). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

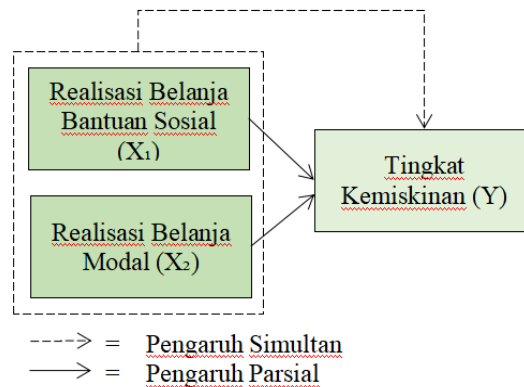
H₁: Realisasi Belanja Bantuan Sosial berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2020

H₂: Realisasi Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2020

H₃: Realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Realisasi Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2020

Kerangka Penelitian

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh sejumlah variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan satu variabel dependen serta dua variabel independen. Variabel dependen yang dimaksud, yakni Tingkat Kemiskinan (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Realisasi Belanja Modal (X_2). Hubungan antarvariabel dijelaskan melalui analisis regresi data panel. Masing-masing variabel independen akan diuji pengaruhnya secara parsial terhadap variabel dependen. Selanjutnya, secara keseluruhan variabel independen akan diuji pengaruhnya simultan terhadap variabel dependen. Kerangka pikir penelitian diilustrasikan pada Bagan 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada ukuran kuantitas atau jumlah yang mana dapat diaplikasikan pada fenomena yang diobservasi, serta umumnya menggunakan data kuantitatif berupa angka (Fauzi et al., 2019, p. 9). Penelitian jenis ini mempunyai kemampuan generalisasi hasil (Sekaran & Bougie, 2017), dan berlandaskan pada sifat positivisme (Sugiyono, 2011).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan menggunakan sumber data sekunder dengan tipe data panel. Data yang penulis gunakan bersumber dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, n.d.) dan Badan Pusat Statistik (BPS, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c, n.d.-d, n.d.-e.). Data realisasi belanja bantuan sosial dan realisasi belanja modal dalam penelitian ini masih termasuk ke dalam jenis belanja tidak langsung. Hal ini disebabkan periode data realisasi kedua belanja berada dalam periode 2010—2020, sehingga belum diperlakukan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 187 populasi yang dihitung dari ketujuh belas kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010—2020. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 sampel yang dihitung dari kesepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010—2020 melalui teknik *purposive sampling*.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data dokumentasi, baik dokumentasi dalam bentuk virtual dan *hardcopy*. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, yaitu data realisasi belanja bantuan social, data realisasi belanja modal, serta data tingkat kemiskinan.

Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

1. Estimasi Model Regresi Data Panel
Penelitian menggunakan model analisis regresi data panel dengan tiga pendekatan yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM).
2. Pengujian Model Regresi Data Panel

Setelah melakukan estimasi model regresi data panel, dilakukan pengujian untuk memilih pendekatan model yang paling tepat. Pengujian meliputi uji *chow*, uji *hausman*, dan/atau uji *lagrange multiplier* (LM).

3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi data panel dilakukan, pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan data secara umum yang meliputi nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah data memenuhi asumsi klasik. Pengujian yang meliputi uji koefisien determinasi, uji *t* parsial, serta uji *F* simultan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel melalui bantuan perangkat lunak *Eviews 11 Student Version*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan daerah otonom berupa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan secara geografis terletak di antara 1'—4' Lintang Selatan dan 102'—106' Bujur Timur (BPS, 2019). Provinsi seluas 86.700,86 km² memiliki batas-batas meliputi Provinsi Bengkulu di sebelah bagian barat, Provinsi Jambi di sebelah bagian utara, Provinsi Bangka Belitung di sebelah bagian timur, serta Provinsi Lampung di sebelah bagian selatan. Secara administratif, provinsi ini memiliki 13 kabupaten, empat kota, 239 kecamatan, serta 386 kelurahan.

Dari ketujuh belas daerah tingkat kabupaten dan kota, penelitian mengambil sepuluh kabupaten/kota sebagai objek penelitian. Kesepuluh daerah meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau, dan Kota Pagar Alam. Kriteria sampel didasarkan pada pertimbangan kelengkapan data realisasi belanja bantuan sosial dan modal dari laman DJPK serta data tingkat kemiskinan dari laman BPS periode 2010—2020. Dalam hal ini, ketidaklengkapan data ditunjukkan oleh APBD lima kabupaten, yakni tidak memuat jenis belanja bantuan sosial di tahun tertentu (DKPK, n.d.) serta adanya pemekaran Kabupaten Musi Rawas menjadi Musi Rawas Utara (sripoku.com, 2020) dan Kabupaten Muara Enim menjadi Penukal Abab Lematang Ilir (Darmawan, 2019) sehingga tujuh kabupaten tidak dipilih sebagai sampel.

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rata-rata realisasi belanja bantuan sosial tertinggi, yaitu sebesar Rp42.284.503.183, sedangkan Kota Lubuklinggau memiliki rata-rata belanja bantuan sosial terendah, yaitu sebesar Rp1.228.842.618.

2. Realisasi Belanja Modal

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rata-rata realisasi belanja modal tertinggi, yaitu sebesar Rp858.709.753.719, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki rata-rata belanja modal terendah, yaitu sebesar Rp197.799.270.146.

3. Tingkat Kemiskinan

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 17,65%, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki rata-rata tingkat kemiskinan terendah, yaitu sebesar 9,13%.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Peneliti melakukan estimasi model regresi data panel menggunakan bantuan perangkat lunak *Eviews 11 Student Version* untuk memilih model terbaik. Pendekatan estimasi yang dilakukan terdiri dari *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), serta *random effect model* (REM).

Pengujian Model Regresi Data Panel

1. Uji *Chow*
Uji tersebut menghasilkan nilai probabilitas *chi-square* < 0,05 sehingga *fixed effect model* (FEM) sebagai model yang terpilih. Oleh karena itu, pengujian model dilanjutkan melalui uji hausman untuk menentukan apakah REM atau FEM yang menjadi model terbaik.
2. Uji *Hausman*
Uji tersebut menghasilkan nilai probabilitas *chi-square* > 0,05 sehingga *random effect model* (REM) sebagai model yang terpilih. Oleh karena itu, pengujian model dilanjutkan melalui uji lagrange multiplier untuk menentukan apakah CEM atau REM yang menjadi model terbaik.
3. Uji *Lagrange Multiplier*
Uji tersebut menghasilkan nilai probabilitas *both breusch-pagan* < 0,05 sehingga *random effect model* (REM) sebagai model terpilih. Hasil akhir menunjukkan bahwa REM adalah model terbaik yang dipakai dalam penelitian ini.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Data terdistribusi normal apabila nilai probabilitas > 0,05 dan nilai jarque-bera > 0,05 (Winarno, 2009). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1013 dan nilai jarque-bera sebesar 4,5783 sehingga data dinyatakan lolos uji normalitas.
2. Uji Multikolinearitas
Data bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antarvariabel independen < 0,8 (Gujarati, 2006). Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,1793 sehingga data dinyatakan lolos uji multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Data mengalami homoskedastisitas apabila nilai probabilitas *chi-square* > 0,05 (Afrianto, 2007). Hasil menunjukkan nilai probabilitas *chi-square* melalui model *white* sebesar 0,1384 sehingga data dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

Analisis Statistik Deskriptif

Dilihat dari nilai rata-rata, realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp7.190.000.000 yang nilainya lebih rendah dari nilai standar deviasi sehingga data diindikasikan bersifat variatif. Sebaliknya, data realisasi Belanja Modal (X_2) bersifat homogen dikarenakan nilai rata-rata sebesar Rp386.000.000.000 memiliki nilai lebih tinggi dari nilai standar deviasi. Tingkat Kemiskinan (Y) memiliki rata-rata sebesar 13,4043% yang masih menduduki posisi di bawah rata-rata tingkat kemiskinan pada 2020. Selanjutnya, realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1) memiliki nilai maksimum terbesar Rp390.000.000.000 dan nilai minimum Rp0. Berbeda halnya dengan realisasi Belanja Modal (X_2), variabel independen ini memiliki nilai maksimum dan nilai minimum jauh lebih besar daripada realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1), yakni secara berturut-turut sebesar Rp1.380.000.000.000 dan Rp27.200.000.000.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kemampuan menjelaskan informasi semakin baik apabila *adjusted R²* semakin mendekati 1. Nilai *adjusted R²* diketahui sebesar 0,1177. Dengan kata lain, Belanja Bantuan Sosial (X₁) dan Belanja Modal (X₂) hanya mampu memprediksi Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 11,77%. Artinya, sisa persentase sebesar 88,23% dipengaruhi variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam studi ini.

2. Uji t Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016). Tiap variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai probabilitas Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X₁) diketahui sebesar 0,3927 dan Realisasi Belanja Modal (X₂) sebesar 0,0000. Nilai Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X₁) diketahui sebesar -0,8581 dan Realisasi Belanja Modal (X₂) sebesar -4,0916. Hasil ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji t Parsial

Variabel	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal
Probabilitas	0,3927	0,0000
t_{hitung}	-0,8581	-40,916
t_{tabel}		1,982
Hasil	Tidak Berpengaruh	Berpengaruh

Sumber: Data sekundr diolah (2021)

Uji t parsial menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X₁) tidak memiliki pengaruh parsial dikarenakan nilai probabilitas > 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berbeda halnya dengan Belanja Bantuan Sosial (X₁), Realisasi Belanja Modal (X₂) memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) dikarenakan nilai probabilitas < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dalam hal ini, tanda negatif pada t_{hitung} menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal (X₂) memiliki hubungan negatif dengan Tingkat Kemiskinan (Y).

3. Uji F Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen secara paralel atau simultan (Ghozali, 2016). Seluruh variabel independen dikatakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai probabilitas < 0,05 dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Nilai probabilitas diketahui sebesar 0,0004 dan nilai F_{hitung} sebesar 8,2713. Nilai F_{tabel} sebesar 3,08 didapat melalui rumus $F_{tabel} = k_{N-k}$. Hasil ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji F Simultan

Variabel	Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal
Probabilitas	0,0004
F_{hitung}	82,713
F_{tabel}	3,08
Hasil	Berpengaruh Signifikan secara Simultan

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Uji F simultan menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Belanja Modal (X_2) memberikan pengaruh negatif serta signifikan secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Hasil ini dikarenakan kedua variabel independen memiliki nilai probabilitas $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *random effect model* (REM) merupakan model terbaik dalam pengestimasiannya dalam studi ini. Hasil ditunjukkan melalui persamaan regresi data panel berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

$$Y = 14,1900 - 1,79 \times 10^{-12} \text{BANSOS} - 2 \times 10^{-12} \text{MODAL}$$

1. Belanja Bantuan Sosial (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y)

Model regresi menghasilkan nilai konstanta yang bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki nilai sebesar 14,1900 ketika belanja bantuan sosial konstan. Selanjutnya, nilai koefisien belanja bantuan sosial sebesar $-1,79 \times 10^{-12}$ mengindikasikan adanya hubungan negatif antara belanja bantuan sosial dan tingkat kemiskinan. Apabila belanja bantuan sosial menurun sebesar 1%, tingkat kemiskinan meningkat sebesar $-1,79 \times 10^{-10}\%$ dengan asumsi belanja modal bersifat *ceteris paribus*. Pengaruh negatif belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan selaras dengan hasil penelitian Rarun et al. (2018) di Provinsi Sulawesi Utara dan Anderesta (2019) di Indonesia.

Berbeda halnya dengan hasil pengujian t parsial, Realisasi Belanja Bantuan Sosial (X_1) ternyata tidak memiliki pengaruh secara parsial. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas $> 0,05$, yakni 0,3927 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yakni $-0,8581 < 1,982$.

Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Mufliha, 2018). Belanja daerah ini pun memang khusus dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat (Sendouw et al., 2017). Dengan kata lain, hasil pengujian hipotesis memiliki hasil berbeda antara penelitian terdahulu dan model yang ada dalam penelitian ini. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 belanja bantuan sosial merupakan jenis belanja yang bersifat selektif dan hanya dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah Daerah di lingkup Sumatera Selatan dapat melakukan upaya mempertajam implementasi pemberian Bantuan Sosial, misalnya dengan memperjelas kriteria dan memberikan secara selektif pada calon penerima Bantuan Sosial yang *eligible*. Dengan demikian, alokasi Bantuan Sosial lebih tepat sasaran dan dapat lebih efisien, mengingat secara empiris Belanja Bantuan Sosial tidak membuahkan pengaruh secara parsial.

2. Belanja Modal (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y)

Model regresi menghasilkan nilai konstanta yang bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki nilai sebesar 14,1900 ketika belanja modal konstan. Nilai koefisien belanja modal sebesar -2×10^{-12} mengindikasikan adanya hubungan negatif antara belanja modal dan tingkat kemiskinan. Apabila belanja modal menurun sebesar 1%, tingkat kemiskinan meningkat sebesar $-2 \times 10^{-10}\%$ dengan asumsi belanja bantuan sosial bersifat *ceteris paribus*. Pengaruh negatif belanja modal terhadap tingkat kemiskinan memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Wati (2015) di 33 Provinsi di Indonesia, Sendouw et al. (2017) di Kota Manado, Isa (2018) di Provinsi Gorontalo, serta Mukarramah (2020) di Provinsi Aceh.

Sama halnya dengan hasil pengujian t parsial, Realisasi Belanja Modal (X_2) juga memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas $< 0,05$, yakni 0,0000 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yakni $-4,0916 > 1,982$. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa belanja modal adalah jenis belanja daerah yang melakukan pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Menurut Sendouw et

al. (2017), belanja daerah ini bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dasar masyarakat. Dengan kata lain, hasil pengujian hipotesis selaras model penelitian sejalan dengan hal tersebut. Pentingnya peran belanja modal dalam meningkatkan kualitas pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan mengharuskan pemerintah daerah untuk terus mengupayakan peningkatan realisasi belanja modal dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

3. Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Belanja Modal (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y)

Hasil pengujian koefisien determinasi memberikan hasil bahwa nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,1177. Nilai ini mengindikasikan bahwa Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Belanja Modal (X_2) hanya mampu memprediksi Tingkat Kemiskinan (Y) sebesar 11,77%. Kemampuan memberikan informasi sebesar 88,23% dimiliki variabel independen lain yang tidak dijelaskan di penelitian ini. Meskipun variabel independen belum mampu memberikan informasi terkait variabel dependen secara menyeluruh, hasil uji F simultan menunjukkan hasil bahwa Belanja Bantuan Sosial (X_1) dan Belanja Modal (X_2) memiliki pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).

Hasil ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $< 0,05$, yakni 0,0004 dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, yakni $8,2713 > 3,08$.

Hasil pengujian F simultan bertolak belakang dengan penelitian Sendouw et al. (2017) di Kota Manado. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan adanya perbedaan besaran pengeluaran pemerintah daerah berupa realisasi belanja bantuan sosial dan modal yang ditetapkan melalui APBD serta tingkat kualitas penyerapan anggaran pemerintah daerah yang disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif kedua belanja tersebut secara simultan terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah sesuai dengan maksud pengalokasian anggaran untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendapatkan penjelasan lanjut atas hasil pengujian tersebut di atas, penggunaan model alternatif dalam dilakukan dalam penelitian lanjutan. Misalnya dengan memberikan jeda waktu/*time lag* pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Hal ini sejalan pendapat Paramita (2020) dan Safin (2020) yang menyimpulkan bahwa belanja bantuan sosial dan modal melalui APBD membutuhkan jeda waktu/*time lag* agar dampak atas program yang dijalankan pemerintah daerah dapat dirasakan masyarakat sepenuhnya.

PENUTUP

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan sebagai cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dari lingkup Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan antara lain Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal dalam APBD masing-masing daerah. Realisasi kedua belanja tersebut diharapkan dalam berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan sebagai representasi ukuran kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

Hasil studi ini membuktikan bahwa Belanja Bantuan Sosial (X_1) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel periode 2010—2020. Di sisi lain, Belanja Modal (X_2) secara parsial memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel periode 2010—2020. Namun pada pengujian secara simultan, baik Belanja Bantuan Sosial (X_1) maupun Belanja Modal (X_2) memberikan pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010—2020.

Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih lanjut mengenai temuan di atas, misalnya dengan memberikan jeda waktu/*time lag* dalam pemodelan penelitian agar pengaruh terkuat realisasi belanja bantuan sosial dan modal terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Provinsi Sumsel terdeteksi.

REFERENSI

- Afrianto, M. D. (2007). *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. Erlangga.
- Anderesta, K. (2019). *Pengaruh Bantuan Sosial dan Tingkat Inflasi terhadap Kemiskinan Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2007–2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2019). *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka (Sumatera Selatan in Figures) 2019*. BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2020 (16560.2007)*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-a). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Periode 2010 s.d. 2012*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Periode 2013 s.d. 2015*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-c). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Periode 2016*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-d). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Periode 2017 s.d. 2018*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-e). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten dan Kota Periode 2019 s.d. 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.-f). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2019 dan 2020*.
- Darmawan, R. (2019). Sejarah Terbentuknya Kabupaten PALI, Berawal dari Nama PABLI hingga Penghasil Minyak Eks Stanvac. *Sripoku.Com*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Portal Data Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumsel Periode 2010 s.d. 2020*.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Salemba Empat.
- Isa, D. P. (2018). *Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Kaligis, E., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2017). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02).
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga*. UUP AMP YKPN.
- Lengogeni, S. (2010). Analisis Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78–95.

- Mufliha, N. M. (2018). *Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2013—2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mukarramah. (2020). *Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Universitas Sumatera Utara.
- Natalia, N. D. A., Rumate, V. A., & Tolosang, K. D. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 97—106.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1—11).
- Paramita, A. (2020). *Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar. 1*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2020).
- Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1 s.d. 8.
- Rarun, C. C. E., Kawung, G. M. V., & Niode, A. O. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- RI. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. In R. Indonesia (Ed.), *17/2003*. Republik Indonesia.
- Safin, N. A. (2020). *Model Kinerja Belanja Negara dengan Distribusi Zakat sebagai Variabel Moderasi terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Satari, Z. U. (2017). *Pengaruh Upah, Bantuan Sosial, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011—2015*. Universitas Negeri Jakarta.
- Sejarah Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara atau Muratara, Empat Warga Tewas dan Polsek Dibakar. (2020). *Sripoku.Com*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian (Kedua)*. Salemba Empat.
- Sendouw, A., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(5), 1—15. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suhadak. (2007). *Paradigma Baru: Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Bayumedia.
- Sutrisno, H. (1983). *Metodologi Research*. Universitas Gajah Mada.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Erlangga.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAK, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 142—155.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV, IV 1 (1945).

Wati, H. W. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009–2013 (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *Jurnal Ilmiah*, 1–13.

Winarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN.